

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sebagai proses perubahan ke arah yang lebih baik memerlukan sumber daya diantaranya ketersediaan anggaran. Masalah terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan pembangunan sering terjadi di setiap daerah. Undang-undang Otonomi daerah yang sudah berjalan sejak tahun 2001 hingga saat ini masih harus dibenahi dalam pelaksanaannya. Pemerintah daerah diharuskan lebih aktif dan mandiri dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya yang sangat potensial serta ketergantungan terhadap bantuan pusat harus seminimal mungkin.

Ekonomi pembangunan mengusahakan agar pendapatan masyarakat dapat tercapai secara optimal dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mencapai tujuan dan arah dari pembangunan ekonomi tersebut, maka pembangunan harus didasarkan pada kekhasan daerah dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan yang ada. Pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat harus mampu menaksir potensi sumber daya yang paling diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi menurut Bastian (2007) adalah salah satu tolak ukur untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi suatu daerah, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat memperlihatkan adanya pembangunan ekonomi.

Pembangunan tidak hanya mampu ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, akan tetapi lebih dari itu pembangunan

mempunyai perspektif yang lebih luas. Menurut Kuncoro (2004). Dimensi sosial yang sering diabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi justru mendapat tempat yang strategis dalam pembangunan. Dalam proses pembangunan, selain memperhitungkan dampak aktifitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat, lebih dari itu dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik .Pada saat ini titik berat pemeberian otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah, kabupaten dan kota.

Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa implikasi yang mendasar terhadap penyelenggara pemerintah didaerahnya. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah berlangsung sekarang ini akan mendorong kemampuan daerah untuk mengelolah kesejahteraan mereka masing-masing, dimana setiap daerah dituntut untuk lebih aktif dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi didaerahnya. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi pemerintah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat yang dirangkum dalam tiga prinsip yaitu (1) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI (2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah (3) Tugas pembantuh adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban dengan melaporkan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah disebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan pengelolaan sumber sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara optimal, sehingga akan tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Upaya meningkatkan kemandirian pembiayaan di daerah perlu dilakukan dengan peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) antara lain dengan optimalisasi penggalan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu bagian dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen yang berpotensi untuk dioptimalkan.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sekarang ini lebih memungkinkan dan berpeluang besar untuk ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada Pendapatan Asli Daerah terutama di daerah Kabupaten atau Kota yang mempunyai otonomi yang luas dan utuh sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan daerah.

Menurut Sudrajat dalam (Arjanggi, 2011.) yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan retribusi pasar perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. dalam penelitian ini ia juga menjelaskan bahwa retribusi pasar dipengaruhi oleh faktor jumlah pedagang, luas los, kiosatau ruko dan jumlah

petugas pemungut retribusi. Semakin banyak jumlah pedagang, luas kios, ruko, los dan dasaran terbuka serta jumlah petugas pemungut retribusi maka peranan penerimaan retribusi pasar akan semakin besar.

Pemerintah Kota Kupang dalam mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai potensi yang dimiliki. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Kupang dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, dan perkembangan di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kota Kupang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar, retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ialah salah satu faktor yang dapat menunjang pendapatan daerah kota kupang yaitu melalui retribusi karna pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya distribusi produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk, dengan demikian pasar dapat dikatakan penyedia langsung kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan kontributor bagi pelaksanaan pembangunan daerah karna melalui retribusi yang dihasilkan akan dapat menambah pendapatan asli daerah kota kupang.

Peraturan Daerah Kota Kupang No 02 Tahun 2005 tentang retribusi pelayanan pasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota kupang

No 12 tahun 2006 bahwa unit pelaksanaan teknis daerah pasar telah berubah bentuk menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar). Perusahaan daerah (PD) pasar merupakan perusahaan daerah pasar yang dibangun oleh pemerintah Kota Kupang dan berlokasi di pasar Oebobo Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan daerah pasar mengelola delapan pasar, selain itu perusahaan daerah pasar mengelola area pasar serta membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di Kota Kupang.

Peran pemerintah daerah dalam mengelola pasar yang ada di kota kupang dengan menyediakan fasilitas pasar kepada masyarakat (pemakai jasa pasar) dengan pelayanan fasilitas pasar berupa kios/ruko, los, mck, area parkir air, listrik, kebersihan dan peralatan kepada masyarakat pasar dan sekitarnya dengan pemakai jasa pasar akan membayar kepada kepala pasar yang sudah diberi tugas dalam menagih retribusi tersebut dan kepala pasar akan menyetor ke Dinas Pendapatan Daerah Pasar (PD Pasar) selaku pengelola pendapatan daerah berdasarkan pemakainya. Dengan begitu pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari jumlah fasilitas pasar yang terpakai oleh masyarakat kota kupang dan sekitarnya. Semakin banyak jumlah pemakaian fasilitas pasar Kota Kupang, maka semakin meningkat pula pendapatan dari retribusi pasar tersebut. Kemampuan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tercermin pada setiap realisasi pendapatan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun.

Berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 sampai 2018.

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Kupang 2015-2018 (Rupiah)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2015	125.125.330.759,00	145.500.468.360 00	116,28%
2016	141.027.360.997,00	144.455.277.759,00	107,23%
2017	150.000.000.000,00	160.841.327.759,00	102,43%
2018	250.000.000.000,00	174.994.296.398,00	70,00%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan target disetiap tahunnya. Hal ini terlihat dari tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 sebesar Rp.145.500.468.360,00, pada tahun 2016 turun sebesar Rp.144.455.277.759,00, di tahun 2017 kembali naik sebesar Rp.160.841.327.759,00, dan pada tahun 2018 terjadi kenaikan yang sangat besar sebesar Rp.174.994.296.398,00 namun tidak diimbangi dengan target yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, meski realisasi melebihi target dari tahun 2015-2017 namun pada tahun 2018 realisasi memenuhi target yang artinya pendapatan dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Tabel 1.2
Data Target dan Realisasi Penerimaan RetribusiPasar Kota Kupang
Tahun 2015-2018 (Rupiah)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2015	1.520.763.148	1.464.876.491	96,33%
2016	2.050.000.150	1.964.723.796	95,84%
2017	2.000.250.120	1.971.811.551	98,58%
2018	2.058.150.403	2.036.486.744	98,95%

Sumber: Pendapatan Daerah Pasar Kota Kupang Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi pasar Kota Kupang mengalami fluktuasi target tiap tahun namun realisasi tiap tahunnya masih memenuhi target. Hal ini terlihat pada tahun (2015-2017) yang terus mengalami kenaikan kecali pada tahun 2018 dengan target Rp. 2.058.150.403 dengan tingkat capaian 96,33% pada tahun 2016 naik sebesar Rp. 2.050.000.150 dengan tingkat capaian 95,84% pada tahun 2017 turun menjadi Rp. 2.050.000.150 dengan tingkat capaian 98,58% pada tahun 2018 kembali naik menjadi Rp2.058.150.403 dengan tingkat capaian 98,95% naik turunnya target dan tingkat pertumbuhan di setiap tahun tidak di ikuti realisasi yang mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2015-2018 yang mengalami peningkatan signifikan di setiap tahunnya, meski terjadi naik turunnya target di setiap tahunnya akan tetapi realisasi masih memenuhi target yang ada sebagaimana terlihat dari data realisasi 4 tahun terakhir (2015-2018) selalu meningkat, artinya sumber pendapatan retribusi pasar kota kupang terus meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk meneliti dan menganalisis dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah perkembangan pertumbuhan retribusi pasar Kota Kupang selama tahun 2015-2018?

2. Berapakah besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun anggaran 2015-2018?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Pasar Kota Kupang selama tahun 2015-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perkembangan pertumbuhan retribusi pasar dan selama tahun anggaran 2015-2018.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar kota kupang selama tahun 2015-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, baik bagi penulis, instansi dan masyarakat.

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan tentang besarnya kontribusi retribusi pasar terhadap PAD. Penelitian ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk menambah dan memperluas pengetahuan mengenai masalah yang berkaitan dengan kontribusi pasar dan PAD Kota Kupang

2. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Kota Kupang (wajib retribusi) agar dapat memahami pentingnya retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademis untuk menganalisis atau mengetahui tingkat retribusi pasar dan juga untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pasar terhadap PAD tiap tahunnya